

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Luhulima, Archie Sudiarti. 2007, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan : UU No.7 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Marzuki, Peter. 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patners for Law in Development. 2004, *CEDAW : Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera.
- Roisah, Kholis. 2015, *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press.
- Samosir, Djisman. 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Sefrani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Perkasa, Depok.
- Sihite, Romany. 2007, *Perempuan, Kesenjangan, Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2007, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suriasumantri, Jujur S. 1986, *Ilmu dalam Prespektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*. Jakarta: Gramedia.
- Tim PUSHAM UII. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Warner, Ann. *Recognizing Rights Promoting Progress The Global Impact of The Convention of The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. North Washington DC: International Center for Research on Women (ICRW) Report, 2010. <https://www.icrw.org/publications/recognizing-rights-promoting-progress/>.

Artikel Jurnal

Abdullah, Rahmat Hi. "Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (2015): 49-60.
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/587/526>.

Arat, Zehfra F. Kabasakal. "Feminisms, Women's Right, and the UN: Would Achieving Gender Equality Empower Women ?" *American Political Science Review* (2015): 674-689.
<https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/feminisms-womens-rights-and-the-un-would-achieving-gender-equality-empower-women/3AD231722172A41DE4F80C02390A018D>.

Eddyono, Sri Wiyanti. "Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW." *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara IX* (2007).

Neville, J.W. "Human Rights: Issues in the Welfare State". In: *Post-Keynesian Essays from Down Under Volume III: Essays on Ethics, Social Justice and Economics* (2016). Palgrave Macmillan, London. diakses dari
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137475329_17

Pring, Richard. "My Philosophy of Education and How it Might Relate to Classical Subjects." *Journal of Classics Teaching* (2016): 5-9

Suzanne Bergeron Lemper and Maureen Linker, Lora Bex. "Negotiating the Politics of Space : Teaching Women's Studies in a Women Prison." *NWSA Journal* (2005): 199-207. <http://www.jstor.org/stable/4317140>.

Tim Redaksi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud. "Wujudkan Masyarakat Berdaya yang Melek Aksara dan Gemar Membaca." *Jendela : Pendidikan dan Kebudayaan* Oktober 2016: 21-24.

Zehra f. kabasakal arat, "Feminisms, Women's Rights, and the UN: Would Achieving Gender Equality Empower Women?", *American Political Science Review*, vol. 109, no. 4, 2015, hlm. 674–689., doi:10.1017/S0003055415000386. hlm. 674
<https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/feminisms-womens-rights-and-the-un-would-achieving-gender-equality-empower-women/3AD231722172A41DE4F80C02390A018D>

Makalah

Sulastriyono. "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum - Program Sarjana Mata Kuliah Wajib." *Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2016): 30.

Karya Ilmiah

Feng, Thao. *Aspek Aspek Hukum Internasional sebagai Pedoman Pemerintah dalam Menegakkan Kebebasan Beraga : Studi Kasus Penyegehan Gereja di Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

Tim Pengkajian Hukum BPHN, 2007, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Optional Protocol CEDAW terhadap Hukum Nasional yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, Hasil Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.

Internet

Ditjen PAS Kemenkumham. *Sistem Database Pemasyarakatan*. 2018. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>. 26 Juli 2018.

Erdianto, Kristian. *Kompas.com*. 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/22/04471261/Menjadi.Ibu.Alasan.Kartini.soal.Pentingnya.Pendidikan.bagi.Perempuan?page=2> . 14 Mei 2018.

LAPAS Kelas I Semarang, Hak Kewajiban Larangan Sanksi WBP, <https://lpkedungpane.com/informasi/hak-kewajiban-narapidana/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2018

LAPAS Wanita Klas IIA, *Lingkup Pembinaan*, 2015. <http://lpwanitasemarang.com/2015-11-20-06-50-52/lingkup-pembinaan> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

Tim PPID Lapas Yogyakarta. *Sepintas Tentang LAPAS Kelas IIA Yogyakarta*. 2014. <http://lapaswirogunan.com/selayang-pandang/> . 1 Mei 2018.

Tim Viva. *VIVA.co.id*. 2017. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/891832-yasonna-akui-pembinaan-pada-napi-wanita-belum-optimal>. 17 Februari 2018.

United Nation. *United Nation Treaty Series Online : Chapter IV Human Rights 8, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*. n.d. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en#1 . 18 Februari 2018.

United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. *The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies*. n.d. <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx>. 11 April 2018.

United Nations. *United Nation : Education*. n.d. <http://www.un.org/en/sections/issues-depth/education/index.html>. 25 April 2018.

—. *Universal Declaration of Human Rights*. n.d. <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. 11 April 2018.

Pribadi Wicaksono, *Kemenkumham DIY Pinjam Tanah Sultan untuk Bangun LP Wanita*, Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/752592/kemenkumham-diy-pinjam-tanah-sultan-untuk-bangun-lp-wanita/full&view=ok> . 24 Agustus 2018

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan